

Renstra Perangkat Daerah
2016-2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Kabupaten Kotabaru
2017

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru, disebutkan bahwa :

“ Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah menjadi kewenangan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang anggaran;
- d. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang perbendaharaan;

- e. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program/kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- f. penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan di bidang aset;
- g. penyelenggara pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- h. penyelenggara pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan Lingkup tugasnya;
- i. penyelenggara pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

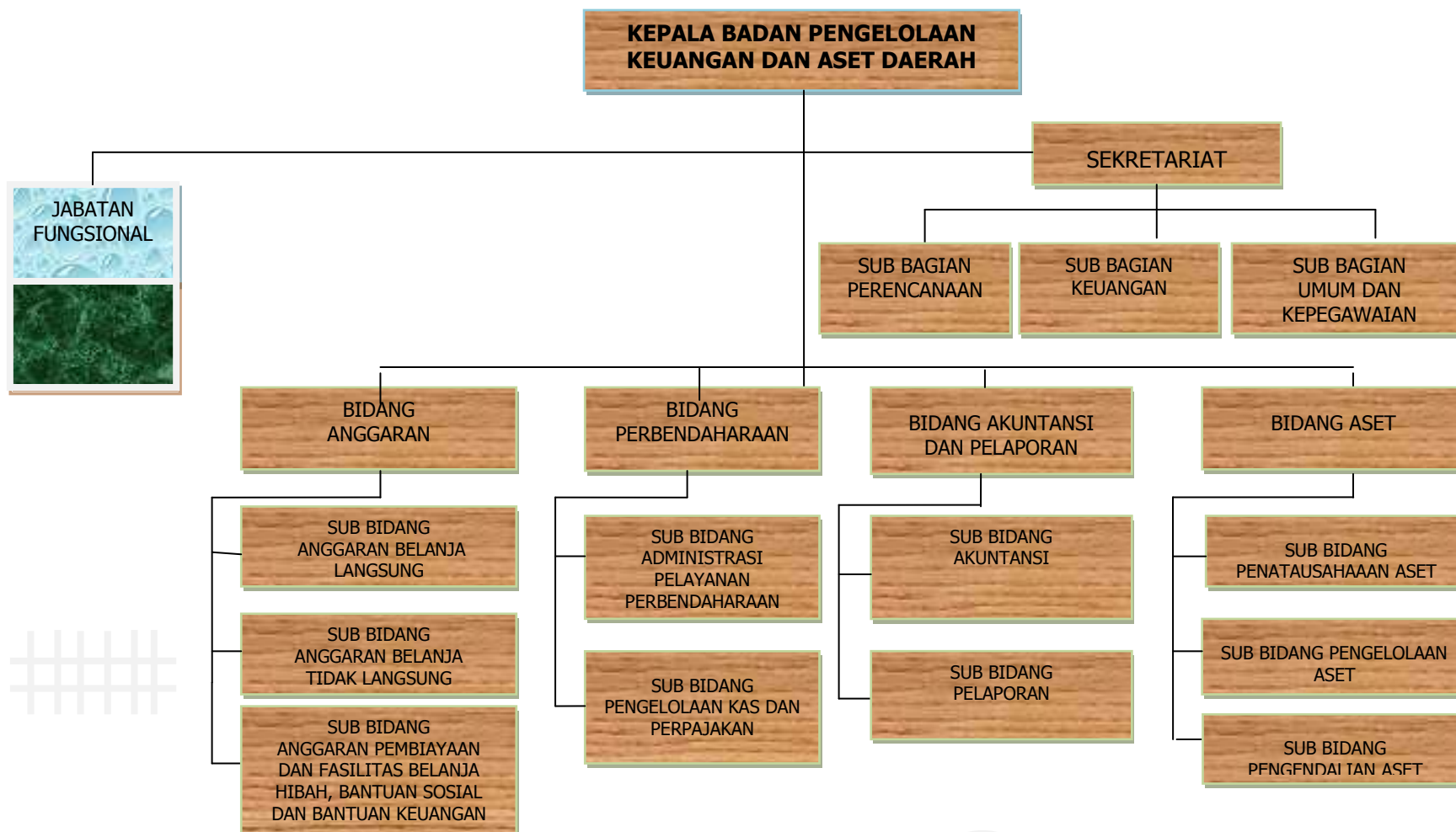
2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten :

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung;
 - 2. Sub Bidang Anggaran Belanja TidakLangsung;
 - 3. Sub Bidang Anggaran Fasilitas Pembiayaan,Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan BantuanKeuangan;
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1.Sub Bidang Administrasi dan PelayananPerbendaharaan;

- 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Perpajakan;
- e. Bidang Akuntansi dan pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Akuntansi;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan;
- f. Bidang Aset, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Aset;
 - 3. Sub Bidang Pengendalian Aset;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**GAMBAR
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAKEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KOTABARU**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru, terkait dengan kepegawaian dan pendidikan penjenjangan dapat dilihat pada tabel 2.2.1 sampai tabel 2.2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Jumlah PNSD BPKAD Kabupaten Kotabaru Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Keadaan s.d 31 Desember 2016											
No	UNIT KERJA	Tingkat Pendidikan								Jlh	
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	
1	Kepala Badan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	Sekretaris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bidang-Bidang	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
4	Subbag/Subbid	0	0	2	0	0	0	1	4	3	10
5	Pelaksana	0	1	16	0	2	10	0	10	1	40
Jumlah		0	1	18	0	2	10	1	14	9	55

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotabaru

Tabel 2.2.2
Jumlah PNSD BPKAD Kabupaten Kotabaru
Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Keadaan s.d 31 Desember 2016

No.	UNIT KERJA	Tingkat Golongan/Kepangkatan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Badan	1	0	0	0	1
2.	Sekretaris	0	0	0	0	0
3.	Bidang-Bidang	1	3	0	0	4
4.	Subbag/Subbid	0	10	0	0	10
5.	Pelaksana	0	11	29	0	40
	Jumlah	2	24	29	0	55

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotabaru

Tabel 2.2.3
Jumlah PNSD BKD Kabupaten Kotabaru
Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
Keadaan s.d 31 Desember 2016

No.	UNIT KERJA	Tingkat Eselonering					Jumlah
		II.a	III.a	III.b	IV.a	Staf	
1.	Kepala Badan	1	0	0	0	0	1
2.	Sekretaris	0	0	0	0	0	0
3.	Bidang-Bidang	0	0	4	0	0	4
4.	Subbag/Subbid	0	0	0	10	0	10
5.	Pelaksana	0	0	0	0	40	40
	Jumlah	1	0	4	10	40	55

Sumber : BPKAD Kabupaten Kotabaru

Tabel 2.2.3
Jumlah PNS Menurut Diklat Penjenjangan
Keadaan s/d Desember 2016

No.	Nama Diklat Penjenjangan	PNS BPKAD
1.	SEPADA/ADUM/DIKLATPIM IV	8
2.	SEPALA/ADUMLA	-
3.	SEPADYA/SPAMA/DIKLATPIM III	4
4.	SESPA/SPAMEN/DIKLATPIM II	0
5.	LEMHANAS	-
JUMLAH 1+2+3+4+5		42
	NON DIKLAT STRUKTURAL	55

Sumber data : Subbag Umum & Kepegawaian BPKAD Tahun 2016

2.2.2 Aset/Modal

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penunjang operasional, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah didukung dengan inventaris kantor/aset kantor yang secara umum dikelola atau dikoordinir sekretariat, yang dalam operasional pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing...

Tabel 2.2.2.1
Jumlah Sarana Pendukung BPKAD
Keadaan s/d Desember 2015

NO	ASET	JUMLAH
1	Mobil Dinas (Inova + Vitara) / (Minibus)	4
2	Mobil Dinas (Hilux) / (Double Cabin)	1
3	Sepeda Motor	21
4	Global Positioning System (GPS)	1
5	Lemari Penyimpanan	1
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	4
7	Lemari Besi	3
8	Filling Besi / Metal	12
9	Brand Kas	8
10	Alat Penghancur Kertas	7
11	Papan Nama Instansi	1
12	Papan Tulis	1
13	Alat Kantor Lainnya (lain-lain) (Plang Korpri)	1
14	Genset	1
15	Mesin Pompa Air	2
16	Papan Nama Ruangan / Jabatan (DUK dan Struktur Organisasi)	2
17	Lemari Kayu	7
18	Rak Kayu	13
19	Kursi Rapat	15
20	Kursi Tamu	3
21	Kursi Putar	19
22	Sofa	6
23	Gordyn	1
24	Taplak Meja	22
25	Mesin Potong Rumput	2
26	Alat Pembersih Lain-lain (Tong Sampah)	10
27	Lemari Es	2
28	AC Split	13

29	Kipas Angin	2
30	Exhaust Fan	4
31	Kompor Gas	1
32	Alat Dapur Lainnya (Piring dan Gelas)	100
33	Tabung Gas	1
34	Dispenser	4
35	Tangga Aluminium	1
36	Selang Air 75m	1
37	Kaca Bening	30
38	Televisi	6
39	Sound System	1
40	Unit Power Supply	1
41	Tandon Air	2
42	Camera Digital	2
43	Alat Pemadam Portable	3
44	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	3
45	Local Area Network (LAN)	1
46	P.C Unit / Komputer PC	36
47	Laptop	20
48	Printer	48
49	Scanner	8
50	UPS	10
51	Hardisk Eksternal	5
52	Server	2
53	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
54	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3
55	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1

a
n

59	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6
60	Proyektor+ Attachment	1
61	Microphone / Wireless Mic	1
62	Handycam	1
63	Handy Talky	6
64	Facsimile	1
65	Gunting Pemangkas	3
66	Piano	1
67	CCTV	4
68	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	136
69	Buku Ekonomi	117
70	Buku Hukum	85
71	Karya Seni Asli, Lukisan Asli (Lukisan Foto, Bunga Hias)	2
72	Tanah	1
73	Bangunan Kantor (Exs Wisma Saijaan)	1
74	Kursi lipat	2
75	Meja Komputer	7
76	Rak TV	1
77	Jam Mekanis	1
78	Teko Listrik	1
79	Cassettec Rekorder	1
80	Pesawat Telephone	2
81	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	2
82	Meja Cetak	1
83	Mesin Penghisap Debu/Valum Cleaner	1
84	Keyboard	4
85	CPU	2
86	Monitor	3
87	Stabilizer /Stavol	3
88	Speaker Aktivie Komputer	1

89	Mouse	3
90	Intalasi Garde Listrik Induk Kapasitas Besar	1
91	Jaringan Cabang Diatribusi Kapasitas Sedsng	1
92	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1
93	Smoke Detecting System & Alaram	1
94	Copy Board /Elektik White Board	1
95	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	1
96	Lemari Pakaian	1
97	Taplak Meja	22
98	Rak Piring	1
99	Rale Piring	1
100	Rounter	1
101	Peralatan Jaringan Lain-lain	1
102	Switch Hub	1
103	Wireless Access Point	2
104	Karpet	5
105	Alat Pemanas	2
106	Alat Hiasan	20

Data Subbag Umum & KepegawaianBPKADTahun 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan berdasarkan tupoksi, Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat DaerahBPKAD secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal,

sarana dan prasarana penggunaan teknologi informatika, anggaran yang proposional dan memadai.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal

Sebagaimana gambaran umum mengenai kondisi jumlah PNS pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebanyak 55 PNS dan tenaga honor 24 orang yang harus melayani 53 Perangkat Daerah, 1 PPKD serta Bupati/Wabup, perbandingan tersebut mengakibatkan beban pegawai BPKAD dalam pelayanan tersebut cukup besar, sehingga berpengaruh pada pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kotabaru.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja pelayanan Perangkat Daerah BPKAD menggunakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi berupa aplikasi :

1. Aplikasi SIMDA Keuangan

Program Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan Versi Akrua digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegritas, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Aplikasi SIMDA Keuangan dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan

dengan baik di tingkat Perangkat Daerah. Aplikasi SIMDA Keuangan dirumuskan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang handal, tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, dan meningkatkan kualitas sistem informasi manajemen keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

2. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah

Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah. Aplikasi SIMDA BMD kerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Output aplikasi SIMDA BMD berupa Perencanaan Pengadaan, Penatausahaan, Penghapusan dan Akuntansi. Aplikasi ini digunakan untuk penyusunan buku, kartu dan laporan inventaris barang dengan output berupa KIB,

KIR, Label Kode Barang, RKBK, LBMD Semesteran dan Tahunan.

3. Aplikasi Sistem Informasi Kas Daerah Online (SIKDO)

Sejak Tahun 2014 BPKAD Kabupaten Kotabaru telah menjalin kerjasama dengan Bank Kalsel dalam menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Kas Daerah Online (SIKDO) yang memudahkan bagi Pemerintah Daerah dalam memonitor arus kas dan transaksi yang terjadi pada Bank Kalsel sebagai bank yang ditunjuk untuk penempatan kas daerah *real time*. Dengan sistem ini pelayanan perbendaharaan lebih cepat dan efisien.

4. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS.

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji PNS Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Taspen (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor JAN.13/C.3.1/2015 dan Nomor 02 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif. Kerjasama tersebut hanya selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2017.

Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah dalam memproses, penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang

dapat diandalkan seperti : Daftar Gaji, Gaji terusan, Perhitungan Pajak, Daftar Pegawai dan Register-register.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru, tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama pada Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (=capaian/target x 100%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah dokumen APBD dan APBD P	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Jumlah Dokumen DPA/DPPA dan Anggaran Kas Perangkat Daerah	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Jumlah Dokumen Analisis Standar Biaya	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Jumlah Aplikasi SIMDA dalam TUKD Perangkat Daerah	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Jumlah Rancangan APBDes yang dievaluasi	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %

6	Jumlah Dokumen Register SP2D Perangkat Daerah	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Jumlah dokumen kas daerah	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Jumlah dokumen prognosis realisasi anggaran pemerintah daerah	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Jumlah buku sistem akuntansi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah.	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %

12	Jumlah dokumen buku inventaris pemerintah daerah	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %
13	Jumlah dokumen data nilai aset pemerintah daerah	-	100 %	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %

2.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah pada level program, selanjutnya kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan di analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam tabel 2.3.1

Tabel 2.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	APBD	APBDP	Realisasi	Rasio Antara Realisasi & Anggaran
TAHUN 2012					
1.	Belanja	29.498.700.596,-	38.410.910.096,-	31.291.634.163,-	81,47 %
2.	Belanja Tidak Langsung	10.293.207.196,-	10.293.207.196,-	7.704.702.594,-	74,85 %
3.	Belanja Langsung	19.205.493.400,-	28.117.702.900,-	23.586.931.569,-	83,89 %
TAHUN 2013					
1.	Belanja	29.634.894.084,-	37.590.570.594,-	28.740.665.736,-	76,46
2.	Belanja Tidak Langsung	8.559.464.394,-	9.509.464.394,-	8.613.592.456,-	90,58
3.	Belanja Langsung	21.075.429.690,-	28.081.106.190,-	20.127.073.280,-	71,68
TAHUN 2014					
1.	Belanja	29.854.709.358,-	57.097.185.638,-	32.177.140.830,-	56,36
2.	Belanja Tidak Langsung	10.278.673.608,-	21.538.673.608,-	11.322.089.227,-	52,57
3.	Belanja Langsung	19.576.035.750,-	35.558.512.030,-	20.855.051.603,-	58,65

No	Uraian	APBD	Realisasi	Realisasi	Rasio Antara Realisasi & Anggaran
TAHUN 2015					
1.	Belanja	34.754.123.515,-	40.869.636.515,-	34.006.630.752,-	83,21
2.	Belanja Tidak Langsung	13.921.368.898,-	14.231.368.898,-	13.238.223.523,-	93,02
3.	Belanja Langsung	20.832.754.617,-	26.638.267.617,-	20.768.407.229,-	77,96

TAHUN 2016					
1.	Belanja	45.288.140.338	40.753.435.199	38.090.126.825	93,46
2.	Belanja Tidak Langsung	17.794.048.250	16.059.555.961	15.381.313.224	95,78
3.	Belanja Langsung	27.494.092.088	24.693.879.238	22.712.813.601	91,98

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

• *Tantangan*

1. Masih lambannya Perangkat Daerah dalam menyampaikan dan mengimput data-data aset/barang milik daerah, seperti Rencana Kebutuhan Barang/Pemeliharaan Barang, Kartu Inventaris Barang, Laporan Barang Semesteran dan Tahunan, serta Laporan Hasil Pengadaan Barang. Hal ini berakibat pada terhambatnya proses penyusunan Buku Inventaris Daerah dan Neraca Aset Daerah
2. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum mampu menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar akuntansi Pemerintah secara benar dan tepat waktu.
3. Perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat pada bidang pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah yang sering terjadi dan kurang disosialisasikan, menimbulkan ketidakjelasan dan multi tafsir dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di daerah serta dalam pengambilann keputusan pejabat terkait.

• *Peluang*

1. Dilaksanakannya inventarisasi dan rekonsiliasi aset/barang milik daerah secara berkala, baik berupa kegiatan sensus barang, penilaian barang, maupun penghapusan barang melalui tim koordinasi secara terpadu yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.

2. Adanya program dan kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara baik Pria maupun Wanita pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan BPKAD melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, baik di tingkat Kabupaten maupun di Provinsi dan Pemerintah Pusat.
3. Adanya penambahan/mutasi PNS yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan ke BPKAD untuk menjalankan tugas dan fungsi BPKAD yang cukup berat.
4. Adanya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, khususnya gedung kantor baru yang lebih representatif yang sedang dibangun di kawasan Sebelimbingan. Hal ini dapat lebih meningkatkan semangat dan optimalisasi pelayanan BPKAD kepada Perangkat Daerah/Pihak Ketiga.
5. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, seperti sistem aplikasi berbasis komputer dan media sosial (website).
6. Diterapkannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan dan akuntabel serta terhindar dari kemungkinan terjadinya penyelewengan APBD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Perangkat Daerah. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1. Data Jumlah PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Desember 2016 sebanyak 55 orang PNS dan 24 orang Tenaga Non PNS yang harus melayani 60 Perangkat Daerah, 1 PPKD serta Bupati/Wabup, perbandingan tersebut mengakibatkan beban pegawai BPKAD dalam melayani Perangkat Daerah Pemerintah Kotabaru cukup besar, sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kotabaru.
2. Masih adanya keterlambatan dari Perangkat Daerah dalam penyampaian dokumen pertanggungjawaban fungsional ke Bidang Perbendaharaan BPKAD sebagai laporan penggunaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan secara tepat waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan hal-hal teknis yang terkendala jika terjadi gangguan teknis dalam jaringan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.

3. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaporkan inventaris barang yang dimiliki secara berkala setiap semesteran/tahunan sehingga menyulitkan bagi BPKAD untuk menginventarisasi data (pemutakhiran *data base*) sebagai Aset Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Hal ini menyebabkan BPKAD belum dapat menyusun Neraca Aset Daerah yang wajar yang sinkron dengan data akuntansi, yang berakibat pula pada opini hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka mempertahankan WTP

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021, maka visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah:

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih :

“Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan dibidang Agrobisnis dan Kepariwisataaan Serta Kemandirian Menuju Masyarakat yang Berkualitas dan Sejahtera”

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih:

1. Mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor produksi dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk menunjang Eko Wisata dan Agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kabupaten Kotabaru.

2. Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera.
4. Mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong.
5. Mewujudkan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, terampil.
6. Mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial dan penanggulangan/pengentasan kemiskinan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dalam RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru terkait erat dengan pelaksanaan misi ke 7 yaitu “mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”, sebagai bentuk operasional dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru melalui program dan kegiatan-kegiatan terkait.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah BPKAD, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat dalam tabel 3.2

Tab3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD Terhadap Pencapaian Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan dibidang Agrobisnis dan Kepariwisata Serta Kemandirian Menuju Masyarakat yang Berkualitas dan Sejahtera”

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah BPKAD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan	Terhambatnya proses penyusunan Buku Inventaris Daerah dan Neraca Aset Daerah.	Masih lambannya Perangkat Daerah dalam menyampai kan dan menginput data-data aset/ barang milik daerah, seperti Rencana Kebutuhan Barang/ PemeliharaanBarang, Kartu Inven taris Barang, Lapo ran Barang Semes teran dan Tahunan, serta Laporan Hasil Pengadaan Barang.	Dilaksanakannya inventarisasi dan rekonsiliasi aset/barang milik daerah secara berkala, baik berupa sensus barang, penilaian barang, maupun penghapusan barang melalui tim koordinasi secara terpadu yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya
		Masih banyak Perangkat Daerah yang belum mampu menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah secara benar dan tepat waktu	Masih adanya keterlambatan dari Perangkat Daerah dalam penyampaian dokumen Pertanggungjawaban fungsional ke Bidang Akuntansi sebagai Laporan Penggunaan Anggaran yg harus dipertanggungjawabkan secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan hal-hal teknis yang terkendala jika terjadi gangguan teknis dalam jaringan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Mensosialisasikan dan membuat surat edaran kepada seluruh Perangkat Daerah untuk meyampaikan dokumen Pertanggungjawaban fungsional secara tepat waktu ke BPKAD sebagai laporan penggunaan anggaran.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

		Perubahan kebijakan dan peraturan Perundang-undangan di tingkat pusat pada bidang pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah yang sering terjadi.	Ketidakjelasan dan multi tafsir dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di daerah serta dalam pengambilan keputusan pejabat terkait.	Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan & aset di daerah dalam pengambilan keputusan pejabat terkait.
		Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dan perlu penambahan pegawai.	Beban Pegawai BPKAD dalam melayani Perangkat Daerah lainnya cukup besar sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Kotabaru.	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penambahan/mutasi PNS yang sesuai kompetensi yg dibutuhkan ke BPKAD untuk menjalankan tugas dan fungsi BPKAD yang cukup berat serta • Adanya program dan kegiatan peningkatan kualitas SDM Aparatur BPKAD melalui Diklat, Bintek, Sosialisasi peraturan Perundang-undangan, baik di tingkat Kabupaten maupun di Provinsi dan Pemerintah Pusat

3.3 Telaahan Renstra K/L

Karena BPKAD tidak terkait dengan k/l, kememkeu bukan k/l vertikalnya, beda dengan perindustrian, ada kementriannya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Selanjutnya dibawah ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan disajikan dalam tabel 3.4

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Adanya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, khususnya pembangunan gedung kantor BPKAD	Kantor yang sekarang ditempati adalah eks. Wisma Saijaan yang belum memadai untuk dijadikan kantor BPKAD mengingat ukurannya yang tidak menukupi dan arsip yang menumpuk di masing-masing ruangan	Masih menempati gedung eks. Wisma Saijaan sampai pembangunan kantor BPKAD di daerah sebelimbingan selesai dibangun	Dengan adanya gedung kantor baru yang lebih refresentatif yang sedang dibangun di kawasan Sebelimbingan dapat lebih meningkatkan semangat dan optimalisasi pelayanan BPKAD kepada Perangkat Daerah/Pihak ketiga.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang saat ini sedang berkembang serta prediksi situasi dan kondisi dalam lima tahun kedepan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD, dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

BPKAD sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan, menetapkan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, BPKAD disamping sebagai salah satu perangkat daerah dalam struktur pemerintahan Kabupaten Kotabaru, juga melaksanakan fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), yaitu selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai SKPKD, maka Kepala BPKAD melaksanakan fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Berdasarkan fungsi ini, maka BPKAD memiliki tugas penting dan bertanggungjawab dalam penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD, perbendaharaan (pengeluaran keuangan) daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Disamping itu, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kepala BPKAD juga berfungsi selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah (Sekretaris Daerah) dalam pengelolaan seluruh barang inventaris daerah, meliputi penatausahaan barang sejak perencanaan hingga pelaporan serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

Dari kondisi tersebut, BPKAD harus memiliki kemampuan dan kehandalan dalam pelaksanaan tupoksi dengan sumber daya yang ada. Meskipun sumber daya manusia yang terbatas, baik secara kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana perkantoran yang kurang mendukung dan jauh dari refresentatif, BPKAD tetap dituntut untuk melaksanakan tugas dan pelayanan kepada semua Perangkat Daerah, Pihak Ketiga dan pemangku kepentingan lainnya secara optimal, cepat dan tepat.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal pada BPKAD Kabupaten Kotabaru dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya program dan kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia/Aparatur pada Perangkat Daerah BPKAD melalui Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis, Sosialisasi Peraturan baik di tingkat Kabupaten maupun di Provinsi dan Pemerintah Pusat.
2. Adanya penambahan/mutasi PNS yang sesuai kompetensi yang dibutuhkan sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD yang cukup berat.
3. Kondisi Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di satuan kerjanya masih kurang mendukung, hal ini disebabkan antara lain karena kompetensi pegawai terkait pengelolaan keuangan yang belum sesuai, sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyusunan rencana anggaran/kebutuhan barang, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, hingga

penyampaian laporan keuangan dan aset, hal ini ditambah pula kurang optimalnya pengendalian dari pimpinan SKPD.

4. Perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat pada bidang pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Daerah yang sering terjadi dan kurang tersosialisasikan, menimbulkan ketidakjelasan dan multi tafsir dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di daerah serta dalam pengambilan keputusan pejabat terkait.
5. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang masih belum banyak dipahami pejabat terkait keuangan dan aset.
6. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta memperkecil/mengurangi temuan, hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7. Adanya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran, khususnya gedung kantor baru yang lebih representatif yang sedang dibangun di kawasan Sebelimbingan, hal ini dapat lebih meningkatkan semangat dan optimalisasi pelayanan BPKAD kepada Perangkat Daerah/Pihak Ketiga.
8. Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, seperti sistem aplikasi berbasis komputer dan media sosial (*website*).
9. Seiring dengan era keterbukaan informasi, masyarakat menjadi semakin kritis terhadap pelayanan dan kebijakan pemerintah, hal ini menuntut diterapkannya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan

pemerintah secara transparan dan akuntabel serta terhindar dari kemungkinan terjadinya penyelewengan.

c. Isu-Isu Strategis pada BPKAD

1. Profesionalisme, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pejabat terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Sarana dan prasarana kerja yang representatif.
3. Sistem pengendalian internal pemerintah dari para pimpinan Perangkat Daerah.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, Sesuai dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021, Satuan Organisasi Perangkat Daerah BPKAD Kabupaten Kotabaru terkait dengan pelaksanaan misi ke 7 sebagai bentuk operasional dalam mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”. Maka Visi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yaitu :

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel”

Makna dari visi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah :

1. Akuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal pengelolaan keuangan mulai dari peanggaran, pelayanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah, pengelolaan asset daerah, inventarisasi aset daerah dan penyimpanan bukti sah kepemilikan aset daerah sampai dengan pengelolaan akuntansi meliputi pengolahan data akuntansi, penyusunan laporan keuangan daerah, evaluasi dan pelaporan serta pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional

Misi merupakan unsur yang paling fundamental bagi visi suatu organisasi. agar visi dapat diwujudkan, maka misi harus dinyatakan

dengan jelas dan menunjuk pada apa yang harus dipenuhi dan dapat dicapai pada masa yang akan datang.

Misi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah:

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas penyusunan RAPBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan kedepannya. Tujuan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik, maka Tujuan Satuan Organisasi Perangkat Daerah BPKAD yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah
2. Meningkatkan kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Adapun sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dalam Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah Perangkat Daerah, disajikan dalam tabel 4.2.2

Tabel 4.2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran (Tahun)				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	Meningkatkan kualitas Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatkan kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Meningkatnya kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari	120 hari
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Nilai IKM Pelayanan Publik	0	77	80	85	85

--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

4.3.1 Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mewujudkan strategi RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021, yaitu :

- I. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja :
 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan ditargetkan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan target tahun 2021 WTP

Dengan demikian maka strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sbb:

1. Tertib administrasi pengelolaan keuanganan dan Barang milik daerah
2. Penyusunan dan pelaksanaan anggaran berpedoman kepada Regulasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan setiap tahunnya
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan

4.3.2 Kebijakan

Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 dengan strategi pertama:

1. Pembinaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Perangkat Daerah.

Dengan mengacu arah Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 maka kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru adalah :

1. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Barang milik daerah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan upaya sbb :
 - Penyelenggaraan bimbingan teknis, Sosialisasi dan Diklat.
 - Mengikutsertakan PNS Laki-laki dan Wanita dalam diklat-diklat teknis, sosialisasi dan bintek.
 - Mensosialisasikan perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang sering terjadi.
 - Pembentukan Tim dalam peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
 - Peningkatan aplikasi, pemasangan/upgrade system aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah.
 - Pemasangan Jaringan yang terintegrasi.
 - Melaksanakan rekonsiliasi aset, sensus BMD dan Inventarisasi BMD.
2. Penyusunan RAPBD yang berkualitas berpedomanan kepada Regulasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan setiap tahunnya dengan cara :

- Membuat Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
 - Pengembangan dan pengelolaanteknologi informasi keuangan.
 - Selalu berkoordinasi antara TAPD pihak eksekutif dan legislatif
 - Memfasilitasi pelaksanaan
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara :
- Membuat kuisisioner pelayanan publik yang ada di SKPD
 - Menyebarkan kuisisioner ke responden terkait pelayanan yang dilaksanakan
 - Memfasilitasi pelanggan terkait isian kuisisioner
 - Meningkatkan kompetensi sumber daya petugas
-

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Secara garis besar 8 (delapan) program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru selama 5 (lima) tahun kedepan (2016 – 2021) adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah;
6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota.
8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari beberapa program diatas kemudian dijabarkan dalam 59 (lima puluh sembilan) kegiatan antara lain :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
13. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran/Keamanan
14. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
15. Penyediaan Jasa Pengumuman dan Propaganda
16. Penyediaan Data, Informasi dan Publikasi Kinerja Pelayanan
17. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
19. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
20. Pengadaan Mebeleur.
21. Pengadaan Buku/Kepustakaan
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas.
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
26. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
27. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
28. Pengadaan Pakaian Olah Raga Beserta Perlengkapannya.
29. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan
30. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur
31. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

32. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD.
33. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
34. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD.
35. Penyusunan Analisis Standar Belanja.
36. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
37. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.
38. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
39. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.
40. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
41. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
42. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
43. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
44. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
45. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah.
46. Revaluasi Appraisal Aset/Barang Daerah
47. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah.
48. Peningkatan Manajemen data gaji PNSD
49. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Kabupaten
50. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kabupaten
51. Penyusunan DPA, DPPA dan Anggaran Kas Perangkat Daerah
52. Penyusunan Laporan Kas Daerah
53. Pelatihan Penatausahaan Aset/Barang Milik Pemerintah Daerah
54. Pelatihan Teknis Akuntansi Pemerintah Daerah.
55. Peningkatan dan Pengendalian Anggaran Belanja Daerah.
56. Pengendalian dan Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD)

- 57. Manajemen pengelolaan barang milik daerah
- 58. Peningkatan Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan.
- 59. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - 1.1 Jumlah surat
 - 1.2 Jumlah langganan pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - 1.3 Jumlah kendaraan dinas/operasional
 - 1.4 Jumlah pengelola administrasi keuangan dan kegiatan
 - 1.5 Jumlah jasa kebersihan kantor
 - 1.6 Jumlah jenis alat tulis kantor
 - 1.7 Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 1.8 Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 1.9 Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.10 Jumlah terbitan bahan bacaan
 - 1.11 Jumlah orang yang mendapat makanan dan minuman
 - 1.12 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 1.13 Jumlah pegawai non PNS
 - 1.14 Jumlah rapat koordinasi, konsultasi ke dalam daerah
 - 1.15 Jumlah jasa pengumuman dan propaganda
 - 1.16 Jumlah pelaksanaan Hari Jadi, Pameran dan HUT RI
- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - 2.1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2.2. Jumlah perlengkapan kantor
 - 2.3. Jumlah peralatan kantor
 - 2.4. Jumlah mebelair kantor

- 2.5. Jumlah buku/kepustakaan
- 2.6. Jumlah pemeliharaan
- 2.7. Jumlah gedung kantor
- 2.8. Jumlah Kendaraaan dinas/operasional
- 2.9. Jumlah peralatan kantor
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - 3.1 Jumlah pakaian dinas harian pegawai
 - 3.2 Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
 - 3.3 Jumlah pakaian olahraga
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - 4.1 Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi
 - 4.2 Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur BPKAD yang dilaksanakan
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - 5.1 Jumlah dokumen laporan
 - 5.2 Jumlah dokumen laporan
 - 5.3 Jumlah dokumen laporan
 - 5.4 Jumlah Pelaporan E-Audit ke BPK RI
- 6. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - 6.1 Jumlah dokumen analisis standar belanja
 - 6.2 Jumlah dokumen Perda tentang APBD
 - 6.3 Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

- 6.4 Jumlah dokumen Perda tentang perubahan APBD
- 6.5 Jumlah dokumen Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD
- 6.6 Jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 6.7 Jumlah dokumen rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 6.8 Jumlah aplikasi SIMDA dalam pelaksanaan TUKD Perangkat Daerah
- 6.9 Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi paket regulasi tentang keuangan daerah
- 6.10 Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
- 6.11 Jumlah dokumen Buku Inventaris (BI) Pemerintah Kabupaten Kotabaru, jumlah dokumen laporan semesteran, jumlah dokumen laporan tahunan dan jumlah dokumen sensus aset/barang daerah.
- 6.12 Jumlah dokumen data nilai aset per SKPD
- 6.13 Jumlah dokumen administrasi keuangan daerah
- 6.14 Jumlah data pegawai per SKPD yang berhak menerima gaji dan tunjangan
- 6.15 Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran kabupaten
- 6.16 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Pemkab Kotabaru
- 6.17 Jumlah dokumen DPA SKPD/DPPA SKPD dan anggaran kas
- 6.18 Jumlah dokumen laporan kas daerah

- 6.19 Jumlah pelatihan penatausahaan aset/barang milik pemerintah daerah
 - 6.20 Jumlah pelatihan teknis akuntansi pemerintah daerah
 - 6.21 Jumlah dokumen Laporan Anggaran Belanja
 - 6.22 Jumlah dokumen pengendalian informasi keuangan daerah (IKD)
 - 6.23 Jumlah dokumen RKBD, RKPBD, RKBMD, RKPBM, penghapusan BMD, penetapan status pengguna BMD dan neraca barang.
-
- 7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - 7.1 Jumlah Dokumen Register SP2D Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kotabaru
-
- 8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :
 - 8.1 Jumlah RAPBDes yang dievaluasi.

Untuk kelompok sasaran dan pendanaan indikator dapat dilihat pada penyajiannya menggunakan tabel 5.1 sebagai berikut :

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah BPKAD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah BPKAD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tujuan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik dengan Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 yaitu :

Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan ditargetkan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan target sampai tahun 2021 WTP

Adapun Indikator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru yang mengacupa Sasaran RPJMD Kabupaten Kotabaru : 1. Opini BPK terhadap LKPD

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru selama periode 2016-2021, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Kotabaru 2016-2021.

Renstra Perangkat Daerah BPKAD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan ke depan, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru yang merupakan rencana tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru selama periode lima tahun anggaran, 2016 sampai tahun 2021 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh, berdisiplin, bertanggungjawab dan konsisten.

Renstra Badan Pengelolal Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana

tugas pokok dan fungsi yang berkaitan Pembangunan Daerah merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru,

H. ABDUL KADIR, S.Sos, M.AP
NIP. 19620310 198503 1 023